

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan era digital membawa perubahan besar terhadap cara manusia memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Arus data yang begitu deras melalui berbagai platform daring menjadikan informasi mudah diakses oleh siapa pun, namun tidak semua individu mampu mengelolanya secara bijak. Kondisi ini menghadirkan tantangan baru bagi masyarakat, yakni bagaimana memilah, memahami, serta menggunakan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Fenomena penyebaran hoaks, menurunnya minat baca, serta ketimpangan akses terhadap sumber informasi menjadi indikasi bahwa kemampuan literasi informasi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Flores Timur, masih berada pada tingkat yang memprihatinkan. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengevaluasi informasi secara kritis menimbulkan keresahan sosial, sebab mereka menjadi lebih rentan terhadap manipulasi informasi, kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan kesulitan beradaptasi dengan perkembangan teknologi maupun dinamika sosial yang terus berubah. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, lemahnya literasi informasi tidak hanya menghambat proses pembelajaran dan inovasi, tetapi juga membatasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang berbasis pengetahuan.

Perpustakaan daerah memiliki posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan sumber daya manusia, terutama melalui penyediaan akses

terhadap informasi yang berkualitas, inklusif, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Di tengah arus globalisasi serta perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, informasi telah menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia dan berperan besar dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan. Kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan memanfaatkan informasi secara efektif dikenal sebagai literasi informasi (American Library Association [ALA], 1989). Literasi ini tidak hanya terkait kemampuan membaca atau menulis, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis dalam menilai keabsahan informasi serta tanggung jawab etis dalam penggunaannya.

Dalam konteks modern, literasi informasi berfungsi sebagai pondasi penting dalam peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat. Individu yang literat informasi cenderung mampu menggunakan informasi secara efektif untuk menyelesaikan permasalahan, mengambil keputusan rasional, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat literasi yang rendah lebih rentan terhadap pengaruh negatif seperti misinformasi dan hoaks yang marak di dunia digital (Behesty, 2023). Oleh karena itu, penguatan literasi informasi menjadi kebutuhan mendesak untuk membentuk masyarakat yang cerdas dan kritis di era informasi yang penuh distraksi.

Meski demikian, peningkatan literasi informasi di daerah kepulauan seperti Kabupaten Flores Timur masih menghadapi tantangan besar. Kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini memiliki luas wilayah

sekitar 1.666,27 km² dengan karakter geografis pegunungan dan gugusan pulau kecil. Berdasarkan data Kabupaten Flores Timur dalam Angka (Badan Pusat Statistik [BPS], 2025), jumlah penduduknya mencapai 250.456 jiwa, dan lebih dari separuh (52,3%) merupakan generasi muda berusia di bawah 30 tahun. Kondisi demografis ini sebenarnya menunjukkan potensi besar bagi pengembangan kapasitas literasi dan inovasi sosial. Namun, kenyataannya 70% wilayah Flores Timur masih tergolong daerah pedesaan terpencil dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, teknologi, serta sumber informasi.

Jika dibandingkan dengan kabupaten kepulauan lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti Kabupaten Alor, kondisi pendidikan di Kabupaten Flores Timur menunjukkan tantangan yang relatif serupa, namun dengan capaian yang masih lebih rendah pada beberapa indikator kunci. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Alor tercatat sekitar 8 tahun, lebih tinggi dibandingkan Flores Timur yang hanya mencapai 7,4 tahun. Selain itu, partisipasi pendidikan pada jenjang menengah atas di Alor relatif lebih stabil, meskipun tetap mengalami penurunan dibandingkan jenjang pendidikan dasar. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa meskipun sama-sama memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses dan infrastruktur, Flores Timur menghadapi hambatan yang lebih kuat dalam menjaga keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah.

Dampak dari keterbatasan tersebut tercermin pada indikator pendidikan dan literasi masyarakat di Kabupaten Flores Timur. Meskipun akses terhadap pendidikan dasar tergolong tinggi, kualitas dan kesinambungan pendidikan

masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang sekolah dasar mencapai 98,5 persen, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah bersekolah sesuai dengan kelompok usianya. Namun, capaian tersebut tidak diikuti oleh jenjang pendidikan menengah atas, di mana APM mengalami penurunan menjadi 85,2 persen. Jika ditinjau dari Angka Partisipasi Kasar (APK), sebagian besar peserta didik pada jenjang menengah justru berada di luar usia ideal, yang mengindikasikan adanya fenomena keterlambatan sekolah maupun putus sekolah yang kemudian kembali melanjutkan pendidikan. Kondisi ini juga tercermin dari rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas yang masih berada pada angka 7,4 tahun, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencapai 8,1 tahun.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa fondasi literasi dasar masyarakat Flores Timur belum terbentuk secara optimal, sehingga berdampak langsung pada kemampuan literasi informasi. Literasi informasi menuntut kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi secara kritis, yang umumnya berkembang pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang tersebut membatasi kesempatan masyarakat untuk mengasah keterampilan berpikir kritis dan literasi digital. Akibatnya, meskipun sebagian besar penduduk telah menikmati pendidikan dasar, mereka masih menghadapi kesulitan dalam mengelola dan memanfaatkan informasi secara efektif untuk kebutuhan ekonomi, sosial,

maupun pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesenjangan partisipasi pendidikan, khususnya pada jenjang menengah, menjadi salah satu faktor penting yang menjelaskan rendahnya tingkat literasi informasi di Kabupaten Flores Timur.

Selain faktor geografis, terbatasnya infrastruktur perpustakaan turut memperburuk kondisi literasi di daerah tersebut. Menurut laporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur (2023), hanya terdapat 12 unit perpustakaan umum dengan total koleksi sekitar 25.678 eksemplar buku, dan hanya 40% di antaranya yang sudah memiliki koneksi internet stabil. Tingkat kunjungan masyarakat juga masih rendah, dengan hanya sekitar 8% dari total penduduk yang aktif menggunakan layanan perpustakaan, dan sebagian besar pengunjung berasal dari kalangan pelajar (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat belum berjalan secara optimal.

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab lain yang memperlemah tingkat literasi informasi. Berdasarkan hasil penelitian SMERU Research Institute (2022), sekitar 60% rumah tangga di Kabupaten Flores Timur masih bergantung pada pertanian subsisten dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp2 juta per bulan. Keterbatasan ekonomi ini menyebabkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan teknologi informasi menjadi sangat terbatas. Akibatnya, aktivitas literasi belum menjadi budaya yang mengakar, terutama di daerah

pedesaan di mana informasi lebih banyak diperoleh melalui komunikasi lisan dibandingkan sumber tertulis atau digital.

Dari sisi kebijakan, sebenarnya Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Budaya Literasi yang menekankan pentingnya pembiasaan membaca di sekolah dan instansi pemerintahan. Namun, implementasi kebijakan tersebut di Flores Timur masih belum berjalan efektif. Berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri, 2023), Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Flores Timur tahun 2022 hanya mencapai skor 45,6 dari skala 100, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 55,0. Nilai ini menggambarkan bahwa masih terdapat kesenjangan besar antara kebijakan literasi dan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Selain persoalan struktural dan kebijakan, aspek budaya turut menjadi faktor penting dalam pengembangan literasi di Flores Timur. Masyarakat setempat memiliki tradisi lisan yang kuat, di mana pengetahuan dan nilai-nilai diwariskan secara turun-temurun melalui cerita rakyat, lagu adat, dan musyawarah komunitas. Tradisi ini sesungguhnya dapat menjadi potensi besar dalam pengembangan literasi berbasis kearifan lokal. Damayanti (2021) menemukan bahwa perpustakaan desa yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam program literasi cenderung lebih berhasil dalam menarik partisipasi masyarakat karena relevan dengan identitas sosial mereka. Oleh karena itu, adaptasi budaya lokal ke dalam program literasi modern menjadi strategi yang potensial untuk diterapkan di Flores Timur.

Rendahnya tingkat literasi informasi juga berimplikasi luas terhadap bidang ekonomi dan sosial. Masyarakat yang kurang melek informasi akan kesulitan memanfaatkan peluang ekonomi berbasis digital, seperti perdagangan elektronik, pelatihan daring, maupun wirausaha kreatif. Selain itu, rendahnya kemampuan kritis terhadap informasi daring membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh hoaks dan isu provokatif yang beredar di media sosial (Behesty, 2023). Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi aktif terhadap pembangunan daerah menjadi terbatas dan berisiko menurunkan daya saing ekonomi lokal.

Dalam situasi seperti ini, keberadaan perpustakaan daerah menjadi sangat penting. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, lembaga perpustakaan berfungsi sebagai pusat informasi, pendidikan nonformal, pelestarian budaya, serta sarana rekreasi ilmiah. Artinya, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan koleksi buku, tetapi juga berperan sebagai wadah pembelajaran sepanjang hayat. Penelitian Sinaga (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan literasi di wilayah pedesaan.

Dalam konteks ini, RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Flores Timur (2021-2025) menjadi landasan strategi untuk mengatasi tantangan literasi informasi yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan kapasitas ekonomi lokal melalui adaptasi teknologi dan akses pendidikan yang lebih luas. Dokumen ini menetapkan visi

“Mewujudkan Masyarakat Flores Timur yang Berpengetahuan, Berbudaya, dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Informasi dan Arsip Berkualitas”, dengan misi utama meliputi pengembangan layanan perpustakaan sebagai pusat pendidikan dan informasi, pelestarian arsip sebagai warisan budaya, serta peningkatan aksesibilitas informasi melalui digitalisasi dan teknologi. Strategi programnya meliputi pengumpulan koleksi perpustakaan, digitalisasi arsip, pelatihan literasi informasi bagi masyarakat, dan kemitraan dengan sekolah serta komunitas, yang secara langsung mendukung upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses, mentransmisikan, dan memanfaatkan informasi secara kritis.

RENSTRA juga mengintegrasikan indikator kinerja seperti peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan hingga 20% per tahun dan digitalisasi 80% dokumen arsip, sejalan dengan RPJMD Kabupaten Flores Timur yang mendorong pembangunan sumber daya manusia berbasis pengetahuan. Meskipun demikian, implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan SDM, sehingga penelitian ini bertujuan untuk pemerataan efektivitas RENSTRA dalam konteks tantangan lokal seperti geografis kepulauan dan rendahnya budaya baca.

Berdasarkan latar belakang tersebut, judul penelitian ini, yaitu “Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Meningkatkan Literasi Informasi Masyarakat”, dipilih karena secara langsung mengangkat peran strategis dinas tersebut sebagai agen utama dalam mengatasi tantangan literasi informasi di era digital, khususnya di daerah kepulauan seperti

Flores Timur menghadapi keterbatasan akses, infrastruktur, dan budaya baca. Alasan pemilihan judul ini didasarkan pada relevansi isu literasi informasi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, serta kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi strategi efektif yang kontekstual dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi daerah. Judul ini juga dikaitkan dengan RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Flores Timur (2021-2025), yang menekankan program penguatan literasi melalui digitalisasi koleksi, masyarakat, dan kemitraan dengan sekolah serta komunitas, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi agar literasi informasi dapat berkembang secara berkelanjutan dalam mendukung visi daerah menuju masyarakat yang berpengetahuan, berbudaya, dan berdaya saing.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang menggambarkan rendahnya literasi informasi masyarakat di Kabupaten Flores Timur faktor akibat geografis, infrastruktur, ekonomi, dan budaya, serta peran strategis Perpustakaan Daerah sebagai pusat pembelajaran, rumusan masalah dalam penelitian ini terfokus pada analisis strategi dan faktor pendukung serta penghambat. Rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Perpustakaan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam meningkatkan literasi informasi masyarakat?

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan strategi peningkatan literasi informasi di Perpustakaan Daerah Kabupaten Flores Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Perpustakaan Daerah dalam upaya meningkatkan literasi informasi masyarakat Kabupaten Flores Timur.
2. Mengungkap faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan strategi peningkatan literasi informasi di Perpustakaan Daerah Kabupaten Flores Timur, guna memberikan rekomendasi praktis untuk optimalisasi program literasi informasi di masa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kajian akademik tentang literasi informasi, khususnya terkait peran perpustakaan daerah di wilayah lokal seperti Kabupaten Flores Timur. Selama ini, penelitian literasi lebih banyak berfokus pada konteks perkotaan dengan akses teknologi yang memadai, sementara daerah dengan keterbatasan digital masih jarang dikaji. Karena itu, penelitian ini menghadirkan perspektif baru tentang strategi literasi berbasis kearifan lokal dan diharapkan menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan serta program literasi yang sesuai dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga memiliki manfaat langsung yang dapat diterapkan oleh berbagai pihak, antara lain:

- Bagi pengelola perpustakaan daerah:
Memberikan rekomendasi strategi yang lebih efektif dan kontekstual untuk meningkatkan literasi informasi masyarakat Flores Timur.
- Bagi pemerintah daerah:
Menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia, khususnya di bidang literasi informasi, yang selaras dengan program pembangunan daerah.
- Bagi masyarakat Flores Timur:
Membantu meningkatkan kemampuan dalam mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara bijak, sehingga dapat mendukung pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi sosial.